

## IMPLEMENTASI *DYNAMIC GOVERNANCE* PROGRAM KAMPUNG TEMATIK TANGERANG: STUDI KASUS KAMPUNG JIMPITAN

Rifdah Silawarti<sup>1(a)</sup>, Hilman<sup>2(b)</sup>, Muhammad Yus Firdaus<sup>3(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh-Yusuf

<sup>a)</sup>2101010055@students.unis.ac.id, <sup>b)</sup>hilman@unis.ac.id, <sup>c)</sup>yus.firdaus@unis.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

28-07-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

#### Kata Kunci:

Implementasi, Dynamic  
Governance, Kampung Tematik

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip, tantangan, dan dampak implementasi dynamic governance terhadap keberlanjutan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivisme, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pemangku kepentingan meliputi pemerintah, LPM, PKK, RT, dan RW. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman serta triangulasi sumber. Hasil menunjukkan keberhasilan Kampung Jimpitan dalam mengintegrasikan perencanaan visioner (Thinking Ahead) untuk pengembangan jangka panjang, evaluasi dan adaptasi berkelanjutan (Thinking Again) berdasarkan masukan warga, serta kolaborasi lintas sektor (Thinking Across) dengan pemerintah, swasta, dan studi tiru antar kampung. Implementasi program menghadapi tantangan meliputi birokrasi, naik turunnya partisipasi warga, dan keterbatasan anggaran serta waktu. Implementasi ini berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi, memperkuat kepemimpinan komunitas yang inklusif, dan memosisikan Kampung Jimpitan sebagai inspirasi bagi kampung tematik lainnya dalam mewujudkan perubahan positif berkelanjutan.

#### Keywords:

Implementation, Dynamic  
Governance, Thematic Village

#### Corresponding Author:

2101010055@students.unis.ac.id

### ABSTRACT

This research aims to understand the principles, challenges, and impacts of dynamic governance implementation on program sustainability. We used a descriptive qualitative method with a post-positivist paradigm. Data was collected through interviews, observation, and documentation from stakeholders, including the government, LPM, PKK, RT, and RW. Analyzed using the Miles and Huberman model and source triangulation. The results show Kampung Jimpitan's success in integrating visionary planning (Thinking Ahead) for long-term development, continuous evaluation and adaptation (Thinking Again) based on citizen input, and cross-sector collaboration (Thinking Across) with government, private entities, and inter-village comparative studies. Program implementation faces challenges including bureaucracy, fluctuations in community participation, and budget and time constraints. This implementation has an impact on improving community welfare through food security and economic empowerment, strengthening inclusive community leadership, and positioning Jimpitan Village as an inspiration for other thematic villages in realizing positive sustainable change.

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i1.1351>

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan lingkungan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Urbanisasi yang tinggi kerap memicu masalah sosial dan lingkungan, seperti permukiman kumuh, keterbatasan ruang hijau, dan tekanan pada infrastruktur, menuntut pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang partisipatif (Bellastuti & Fathurrahman, 2023; Toda, 2021). Program-program berbasis komunitas menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan warga (Silviana & Mubarak, 2020).

Seiring kompleksitas perkotaan, penerapan konsep *good governance* mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi mendesak (Handayani & Nur, 2019). Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan birokrasi yang belum efisien serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lazuardi, 2022). Observasi di Kampung Jimpitan, Kota Tangerang, menunjukkan bahwa menurunnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam program Kampung Tematik. Awalnya aktif, kini keterlibatan warga berkurang akibat kesibukan individu dan minimnya insentif, berdampak pada pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dan rendahnya kesadaran kebersihan. Keterbatasan lahan parkir juga menghambat potensi ekonomi UMKM dan wisata berbasis komunitas, mengindikasikan hambatan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain persoalan partisipasi, dinamika di Kampung Jimpitan juga memperlihatkan adanya keterlibatan sektor swasta dalam proses pengembangan lahan, khususnya dalam rencana pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura yang memerlukan koordinasi lintas instansi dan prosedur administratif yang panjang. Kondisi ini menghadirkan kompleksitas birokrasi yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi kampung tematik sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek partisipasi masyarakat atau pengelolaan lingkungan tanpa secara eksplisit membahas interaksi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan entitas swasta dalam kerangka *Dynamic Governance*. Dengan demikian, Kampung Jimpitan memperlihatkan dinamika unik berupa kombinasi penurunan partisipasi warga, tantangan koordinasi birokrasi, serta

kebutuhan kolaborasi lintas sektor dalam satu konteks lokal yang spesifik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan tata kelola yang dinamis, dikenal sebagai *Dynamic Governance* (Huraerah, 2022). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan cepat dan kompleks (Mayarni, 2020). Berdasarkan Neo & Chen (Vivi Charunia Wati et al., 2024), *Dynamic Governance* melibatkan *thinking ahead* (perencanaan visioner), *thinking again* (evaluasi dan adaptasi), dan *thinking across* (kolaborasi lintas sektoral), dilengkapi dengan *able people* (SDM kompeten) dan *agile process* (proses lincah) untuk kebijakan responsif dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan di Indonesia dengan keberagaman budaya dan dinamika sosialnya.

Program Kampung Tematik di Kota Tangerang, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 92 Tahun 2020, bertujuan menciptakan lingkungan layak huni, menarik, serta mendorong budaya bersih dan sehat (Antasah & Basyar, 2024; Baren Sipayung & Andi Wahyudi, 2022). Meskipun telah menghasilkan 693 kampung tematik hingga 2019, dengan beberapa berkembang menjadi kampung mandiri seperti Kampung Markisa, implementasinya masih menghadapi tantangan. Rendahnya kesadaran warga, keterbatasan fasilitas pendukung, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat sering memicu pro dan kontra (Khotimah, 2024; H Suaib, Rakia A.S.R., 2022), serupa dengan konflik dalam penataan kawasan kumuh (Marlina et al., 2020). Ini menunjukkan perlunya kolaborasi dan komunikasi efektif.

Penelitian terdahulu banyak membahas *good governance* dan tantangannya, serta program kampung tematik dan hambatanannya. Beberapa studi seperti Bianchi et al. (2021) menekankan penerapan *dynamic governance* dalam konteks regenerasi kawasan urban, namun tidak secara spesifik mengkaji dinamika sosial-budaya dan partisipasi warga dalam program kampung tematik berbasis komunitas. Imaniah et al. (2023) lebih berfokus pada strategi komunikasi kewirausahaan, sementara Suroso et al. (2020) menyoroti rendahnya partisipasi kepala desa tanpa menguraikan sinergi lintas sektor secara komprehensif. Penelitian Kinanti & Harsasto (2019), Timur et al. (2023), serta Subekti & Kurnia Putri (2020) umumnya menekankan aspek pemberdayaan atau infrastruktur, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan

kerangka *Dynamic Governance* sebagai alat analisis utama dalam melihat dinamika kebijakan secara adaptif.

Lebih lanjut, Yuliastuti et al. (2024) dan Ayuningtyas & Rahman (2019) membahas keberlanjutan dan komunikasi kebijakan, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan mekanisme *thinking ahead, thinking again, dan thinking across* dalam konteks tantangan birokrasi lokal. Murliasari (2021) dan Pathak & Deshkar (2023) memberikan perspektif mengenai pengelolaan dana dan pembangunan berkelanjutan, tetapi tidak mengkaji secara spesifik interaksi antara sektor publik dan swasta dalam kerangka kampung tematik di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun penelitian mengenai kampung tematik dan governance telah cukup berkembang, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi *Dynamic Governance* dalam konteks kampung tematik yang menghadapi kombinasi persoalan partisipasi warga yang menurun, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan lahan, serta kompleksitas birokrasi lintas instansi seperti yang terjadi di Kampung Jimpitan masih terbatas. Inilah celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak disentuh dalam studi-studi sebelumnya.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang bagaimana kerangka *Dynamic Governance* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi diuji secara empiris dalam konteks lokal yang memiliki dinamika unik berupa interaksi tiga aktor utama yakni pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam satu program kampung tematik. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek sosial (partisipasi dan pemberdayaan), ekonomi (penguatan UMKM dan ketahanan pangan), serta kelembagaan (koordinasi birokrasi dan kolaborasi lintas sektor) dalam satu kerangka analitis yang komprehensif.

Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memetakan bagaimana prinsip *thinking ahead, thinking again, dan thinking across* bekerja secara simultan dalam mengatasi penurunan partisipasi masyarakat dan hambatan struktural birokrasi, sesuatu yang belum secara eksplisit dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai kampung tematik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan konseptual,

tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan tata kelola perkotaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *Dynamic Governance* dalam program Kampung Tematik di Kampung Jimpitan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak jangka panjang program serta rekomendasi bagi pengembangan kebijakan tata kelola yang lebih responsif dan dinamis, mendukung tercapainya keberlanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi prinsip *Dynamic Governance* dalam program Kampung Tematik di Kampung Jimpitan, Kelurahan Batu Jaya, Kota Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi, serta dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program. Sebagaimana dijelaskan Creswell (2019), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan menekankan proses pengumpulan data dari partisipan serta interpretasi makna atas fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2024 hingga Juli 2025.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Ahmad, 2015). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Lurah Batu Jaya, Wakil Ketua LPM Batu Jaya, Ketua RW 03, Ketua RT 03, Ketua PKK, serta lima orang perwakilan masyarakat Kampung Jimpitan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program Kampung Tematik. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan, artikel ilmiah, serta publikasi daring yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator *Dynamic Governance*, yaitu *thinking ahead, thinking again, dan thinking across*. Setiap wawancara direkam menggunakan perangkat ponsel dan kemudian ditranskripsikan untuk

dianalisis lebih lanjut. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi fisik kampung, aktivitas warga, serta pelaksanaan program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip program, dan dokumen pendukung lainnya digunakan untuk memperkuat hasil wawancara. Dalam proses ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian sebagaimana dijelaskan Sahir (2021).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara dan observasi sesuai dengan dimensi *Dynamic Governance*. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menampilkan pola, hubungan, dan temuan utama di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan membandingkan temuan antar-informan hingga diperoleh pemahaman yang konsisten. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta dokumen pendukung (Abdussamad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Prinsip *Dynamic Governance* pada Program Kampung Tematik

Prinsip *Dynamic Governance* adalah pendekatan tata kelola yang menekankan kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, prinsip ini mengacu pada perencanaan kebijakan jangka panjang yang visioner (*thinking ahead*), refleksi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan (*thinking again*), serta kolaborasi lintas disiplin dan sektor antar berbagai pemangku kepentingan (*thinking across*).

Kampung Jimpitan di Kelurahan Batu Jaya, Kota Tangerang, merupakan contoh implementasi kampung tematik yang memadukan inisiatif masyarakat dan dukungan pemerintah melalui prinsip-prinsip *Dynamic Governance*. Dalam pelaksanaannya, kampung ini tidak hanya menekankan pembangunan fisik semata, tetapi juga pembentukan nilai sosial, peningkatan partisipasi warga, serta pembelajaran kolektif dari pengalaman maupun

praktik terbaik di tempat lain (Aligica et al., 2019).

### *Thinking Ahead*

Pada dimensi *thinking ahead*, pengelola Kampung Tematik Jimpitan menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi perkembangan di masa depan. Hal ini tercermin dari rencana pemanfaatan lahan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Lurah Batu Jaya menjelaskan:

“... Kami berencana membuat surat perjanjian kerja sama (SPK) dengan pihak terkait. Setelah itu akan dilakukan pemadatan lahan rawa yang ada di sekitar kampung untuk dijadikan akses dan tempat parkir. Selain itu, pihak Kampung Jimpitan juga memiliki keinginan untuk membentuk koperasi dan peternakan ayam petelur agar warga bisa lebih mandiri secara ekonomi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya perencanaan strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan koperasi dan kegiatan peternakan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pak Kahfi, yang menyatakan:

“... Langkah yang kami lakukan antara lain menyusun program dengan baik dan menyesuaikan dengan kebutuhan warga. Kami juga mendorong masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada.

Dari sisi masyarakat, Ibu Devy menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan program kampung tematik:

“... Harapannya kampung tematik ini makin berkelanjutan dan terus berkembang, karena banyak kegiatan yang bermanfaat untuk warga.”

Sementara itu, Ibu Eneng yang merupakan pelaku usaha di kampung tersebut menyatakan:

“... Saya pribadi diberi lapak untuk usaha berjalan, jadi menurut saya pengelola sudah memperhatikan kebutuhan warga.”

Temuan ini menunjukkan bahwa program kampung tematik tidak hanya memberikan dampak pada aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Perencanaan jangka panjang tersebut juga berdampak pada meningkatnya pengakuan terhadap Kampung Jimpitan. Pak Kahfi menyatakan:

“... Menurut saya kualitas perencanaan sangat berpengaruh terhadap hasil program. Buktinya Kampung Jimpitan sudah menerima penghargaan dan menjadi lokasi studi tiru.”

Temuan ini sejalan dengan konsep *thinking ahead* dalam *Dynamic Governance* yang menekankan pentingnya perencanaan kebijakan yang visioner untuk menghadapi perubahan di masa depan (Anthony et al., 2024). Perencanaan yang matang memungkinkan program tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

### **Thinking Again**

Dimensi *thinking again* dalam *Dynamic Governance* berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program secara rutin dilakukan oleh pengelola dan masyarakat. Lurah Batu Jaya menjelaskan:

“... Evaluasinya ke depan adalah akses masuk Kampung Jimpitan yang sebelumnya melalui jalan sempit akan dialihkan ke Jalan Garuda agar lebih nyaman.”

Ia juga menambahkan:

“... Untuk merealisasikan penambahan lahan tersebut, akan dibuat perjanjian kerja sama melalui dinas terkait.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan penyesuaian kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas program. Ketua RW 03 juga menyampaikan:

“... Setiap program pasti kami evaluasi untuk melihat apakah sudah berjalan maksimal atau belum. Evaluasi ini juga saya dorong dilakukan oleh ketua RT.”

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Ibu Sumarti menyampaikan:

“... Saya mengusulkan sistem piket dilakukan secara bergilir dan usulan itu diterapkan.”

Ibu Yenny juga menyatakan:

“... Saran dari kelompok PKK biasanya ditindaklanjuti dengan penyesuaian program yang sedang berjalan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Selain evaluasi internal, proses pembelajaran juga dilakukan melalui studi tiru dari kampung lain. Ibu Nunung menyampaikan:

“... Menurut saya penting belajar dari kampung lain, misalnya ide dari minyak jelantah dan *ecoprint*.”

Pak Surahman menambahkan:

“... Belajar dari kampung lain itu penting, kita ambil nilai-nilai positifnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa Kampung Jimpitan memiliki budaya belajar yang terbuka terhadap inovasi dari luar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mayarni (2019) yang menegaskan bahwa keberhasilan *Dynamic Governance* sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk melakukan refleksi dan adaptasi kebijakan secara berkelanjutan.

### **Thinking Across**

Dimensi *thinking across* berkaitan dengan kemampuan untuk membangun kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung Tematik di Kampung Jimpitan melibatkan berbagai aktor. Lurah Batu Jaya menjelaskan:

“... Pengurus sebelumnya sempat melakukan studi tiru ke kampung tematik lain untuk melihat apa saja yang telah dilakukan di sana. Setelah mendapatkan pengetahuan dari hasil studi tiru tersebut kemudian diterapkan di Kampung Jimpitan.”

Selain itu, kolaborasi juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Ibu Yenny menyampaikan:

“ . . . Perencanaan program kampung tematik idealnya memang harus mempertimbangkan keterlibatan berbagai kelompok usia dan gender.”

Ibu Devy juga menyampaikan:

“ . . . Tidak semua ide bisa langsung diterapkan karena ada kendala biaya dan jumlah UMKM yang masih terbatas.”

Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pembelajaran antarwilayah menjadi bagian penting dalam pengembangan program kampung tematik. Hal ini sejalan dengan konsep *thinking across* yang menekankan pentingnya kolaborasi multiaktor dalam tata kelola pemerintahan yang adaptif (Antasah & Basyar, 2024).

### **Tantangan Implementasi Prinsip *Dynamic Governance* pada Program Kampung Tematik**

Penerapan prinsip *Dynamic Governance* dalam program kampung tematik di Kampung Jimpitan telah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangan ini penting untuk diidentifikasi karena menjadi bagian dari proses pembelajaran (*thinking again*) yang memungkinkan adaptasi dan penyempurnaan kebijakan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi hambatan struktural dan kelembagaan, tantangan sosial, serta keterbatasan sumber daya dan waktu (Murliasari, 2021).

Salah satu tantangan utama adalah hambatan struktural dan kelembagaan, khususnya dalam koordinasi lintas instansi. Lurah Batu Jaya mengungkapkan:

“ . . . Kerja sama antara kami, Pemerintah Kota Tangerang, dan PT Angkasa Pura membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosesnya melibatkan banyak pihak.”

Pernyataan ini mencerminkan birokrasi yang kompleks, di mana pelaksanaan teknis terhambat oleh proses administratif yang panjang, seperti dalam pemanfaatan lahan rawa atau pengembangan akses jalan. Hal ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, padahal kebijakan berbasis masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan (Teori Adaptive Policy Implementation). Selain itu, menurut Teori Policy Implementation Process,

ketidakmampuan untuk menyatukan tujuan dan kapasitas antar berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) dapat menyebabkan kegagalan kebijakan.

Ibu Yenny, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Yenny menambahkan:

“ . . . Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta masih perlu ditingkatkan.”

Tantangan sosial menjadi hambatan penting, terutama terkait dengan partisipasi warga yang tidak merata. Ketua RW 03 menyebutkan bahwa tidak semua warga memiliki keseriusan dan komitmen yang sama dalam menjalankan program, dan perbedaan pola pikir ini menjadi hambatan utama dalam memastikan partisipasi aktif. Hal ini sejalan dengan Teori Adaptive Policy Implementation yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang efektif. Ketidakmerataan ini mengindikasikan masalah komunikasi dan pemahaman bersama antara pengelola dan masyarakat, yang dapat mengurangi dampak positif program dan memperlambat perubahan sosial yang diinginkan (Subekti & Kurnia Putri, 2020).

Masalah partisipasi juga ditekankan oleh Pak Slamet, Ketua RT 03, yang menyatakan:

“ . . . Tidak semua warga memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan program. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan pemahaman masyarakat.”

Keterbatasan sumber daya dan waktu juga menjadi tantangan besar. Ibu Devy dan Ibu Nunung menyampaikan:

“ . . . Pelaksanaan *ecoprint* membutuhkan biaya yang cukup besar dan UMKM di sini belum banyak. Jadi ide yang mau diterapkan di sini harus disesuaikan dengan kemampuan kampung.”

Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan untuk mengimplementasikan gagasan baru secara efektif, meskipun ada dukungan dan antusiasme warga (Pattinasarany et al., 2022). Teori Adaptive Policy Implementation menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang dapat beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif jika tidak disesuaikan dengan kondisi lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pengelola program untuk terus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap strategi yang diambil, serta mengadaptasi kebijakan yang lebih fleksibel untuk merespons hambatan yang muncul. Selain itu, diperlukan juga penguatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan keberlanjutan program (Yuliastuti et al., 2024).

### Dampak Implementasi Prinsip *Dynamic Governance* pada program Keberlanjutan Kampung Tematik

Implementasi prinsip *Dynamic Governance* di Kampung Jimpitan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan program kampung tematik, tidak hanya menghasilkan perubahan kebijakan dan perencanaan, tetapi juga mendorong proses yang berkelanjutan dan adaptif. Dampak-dampak tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan partisipasi aktif dalam kegiatan kampung, serta terciptanya inovasi yang menginspirasi kampung lain.

Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi (Zhang et al., 2020). Pak Kahfi menekankan:

*“... Kami mendorong masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.”*

Ibu Sumarti menambahkan:

*“... Warga tidak perlu membeli ke luar untuk beberapa kebutuhan karena bisa memanen sendiri.”*

Berdasarkan informasi tersebut, budidaya tanaman seperti cabai dan terong serta peternakan lele memungkinkan setiap keluarga di Kampung Jimpitan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, mengurangi beban ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.



**Gambar 1. Pemanfaatan lahan oleh warga kampung tematik jimpitan**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025*

Menurut Teori Policy Feedback (Mettler & SoRelle, 2018), kebijakan yang diterapkan tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan sosial serta membentuk pola kebijakan masa depan. Keberhasilan program ketahanan pangan di Kampung Jimpitan telah menciptakan pola kebijakan yang melibatkan lebih banyak aktor (masyarakat, pemerintah, swasta) dalam pengambilan keputusan (Busemeyer, 2022), yang pada gilirannya memperkuat pelaksanaan kebijakan di masa depan.

Selain itu, *Dynamic Governance* juga berkontribusi pada penguatan partisipasi dan kepemimpinan komunitas. Ketua RW 03 menjelaskan:

*“... Membangun kesejahteraan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga nilai kebersamaan dan gotong royong.”*

Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan komunitas untuk bekerja sama dan mengelola program secara bersama-sama. Penguatan kepemimpinan komunitas tercermin dari keterlibatan aktif pengurus RT/RW dan kelompok masyarakat seperti PKK dan KWT dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program.

Ibu Yenny, Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, menyebutkan :

*“... Program ini sangat melibatkan perempuan melalui kegiatan KWT.”*

Keterlibatan perempuan dalam program-program ini memberikan dimensi baru dalam pengorganisasian komunitas, di mana kepemimpinan tidak hanya berada pada

kelompok tertentu, tetapi tersebar merata, menciptakan struktur kepemimpinan yang lebih inklusif dan pengambilan keputusan yang lebih adil (Timur et al., 2023). Teori Goal-Attainment Approach oleh George Homans (1950) mendukung bahwa pencapaian tujuan dalam sistem sosial, seperti peningkatan partisipasi warga dan pengelolaan mandiri, adalah indikator keberhasilan.

Dampak positif besar lainnya adalah kemampuan Kampung Jimpitan untuk menginspirasi dan menjadi contoh bagi kampung tematik lain. Lurah Batu Jaya menyatakan:

“... Sekarang kampung kami sering menjadi tujuan kunjungan dari daerah lain untuk belajar.”

Kampung Jimpitan telah menjadi pusat studi tiru bagi daerah lain yang ingin belajar dan mengadopsi praktik terbaik dari pengelolaan kampung tematik (Kinanti & Harsasto, 2019). Bahkan, Kampung Jimpitan tercatat menjadi percontohan untuk membina 74 kelurahan di Kota dan Kabupaten Tangerang (Dewi, 2025). Selain itu, Kampung Jimpitan aktif menjalin kolaborasi dengan kampung tematik lain, baik dari dalam maupun luar kota (misalnya Kampung Darling di Sudimara untuk belajar pengelolaan sampah). Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi di Kampung Jimpitan tidak hanya berdampak internal, tetapi juga menjadi pusat pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi kampung-kampung lain.

Keberlanjutan kampung tematik ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi terhadap tantangan yang muncul, baik itu dalam hal sosial, ekonomi, atau kelembagaan. Proses evaluasi dan refleksi berkelanjutan memastikan bahwa setiap perubahan direspons dengan tepat, menjaga relevansi dan keberlanjutan program (Mayarni, 2019). Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Dynamic Governance* di Kampung Jimpitan telah menunjukkan bahwa pembangunan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, perencanaan visioner, serta evaluasi berkelanjutan dapat menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

## PENUTUP

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *Dynamic Governance* meliputi Thinking Ahead (perencanaan visioner), Thinking Again

(evaluasi dan adaptasi berkelanjutan), dan Thinking Across (kolaborasi lintas sektor) dalam program Kampung Tematik di Kampung Jimpitan, Kota Tangerang. Hasilnya menunjukkan keberhasilan Kampung Jimpitan dalam mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal jangka panjang, adaptasi kebijakan berdasarkan umpan balik warga, serta kolaborasi kuat dengan pemerintah, swasta, dan studi tiru dari kampung lain.

Implementasi mengalami tantangan meliputi struktural (birokrasi panjang, koordinasi antarinstansi), sosial (partisipasi warga tidak merata), dan keterbatasan sumber daya atau waktu. Implementasi *Dynamic Governance* ini berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi, memperkuat partisipasi dan kepemimpinan komunitas yang inklusif, serta memposisikan Kampung Jimpitan sebagai model inspiratif bagi kampung tematik lainnya dalam mewujudkan perubahan positif berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini dengan menambah variabel lain terkait *Dynamic Governance*, seperti aspek keterlibatan sektor swasta dalam program berbasis komunitas, atau meneliti efektivitas kebijakan berbasis lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian administrasi publik: Teori dan aplikasi*. Penerbit Gaya Media.
- Aligica, P. D., Boettke, P. J., & Tarko, V. (2019). Dynamic governance: Polycentricity and knowledge processes. In *Public governance and the classical-liberal perspective* (1st ed., pp. 60–80). Oxford University Press.
- Aminullah. (n.d.). *Dynamic governance* (Kerangka konseptual: Melembagakan budaya, kapabilitas, dan perubahan) (pp. 17–31).
- Antasah, P. A., & Basyar, M. R. (2024). *Dynamic governance dalam program e-*

- health sebagai sistem layanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Sukolilo Surabaya. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1).
- Anthony, S., Iriani, A., & Nofrima, S. (2024). Dynamic governance in the thinking ahead dimension: Perspectives on the implementation of the South Sumatra Mandiri Food Movement Program. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 5(1), 23–36. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v5i1.398>
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2019). Communication of public policy in implementing Kampung Tematik program in Rejomulyo Sub-District of Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 190–204.
- Baren Sipayung, & Wahyudi, A. (2022). Penerapan good governance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4702>
- Bellastuti, D. B., & Fathurrahman, R. (2023). Konsepsi good urban governance sebagai kerangka pembangunan kota berkelanjutan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 600–623. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060>
- Bianchi, C., Bereciartua, P., Vignieri, V., & Cohen, A. (2021). Enhancing Urban Brownfield Regeneration to Pursue Sustainable Community Outcomes through Dynamic Performance Governance. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 100–114. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1669180>
- Busemeyer, M. R. (2022). Policy feedback and government responsiveness in a comparative perspective. *Politische Vierteljahresschrift*, 63, 315–335. <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00377-8>
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, A. P. (2025, Mei 3). Menilik Kampung Jimpitan wajah nyata kebersamaan dan kemandirian warga. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4738933/menilik-kampung-jimpitan-wajah-nyata-kebersamaan-dan-kemandirian-warga>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Huraerah. (2022). *Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi dynamic governance*. Nuansa Cendekia.
- Ikhsan, K., Samin, R., Akhyary, E., & Negara, I. A. (2020). Implementasi dynamic governance dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik Kota Batam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 385–401.
- Imaniah, I., Purwanto, E., & Shahreza, M. (2023). Bojong Renged Village Government Development Communication Strategy in Empowering Entrepreneurship through Thematic Village Program. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 12(2), 216–232. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v12i2.7531>
- Khotimah, N. (2024). Implementasi kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Alun-Alun Aimas Kabupaten. *Multidisciplinary Science*, 2(1), 19–24.
- Kinanti, A., & Harsasto, P. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui program kampung tematik (Studi kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 21–30.
- Marlina, S. E., Fadli, Y., & Ginanjar, A. (2020). Model kolaborasi pembangunan kawasan perkotaan: Implementasi CAP dalam penataan Kampung Akuarium di DKI

- Jakarta. In *Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0* (pp. 169–196).
- Mayarni, M. (2019). Implementation of dynamic governance concept in regional government of Siak Regency. *IAPA Proceedings Conference*, 35. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.179>
- Mayarni, M. (2020). Kapabilitas dynamic governance pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberlakuan new normal di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(2), 145–167. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894>
- Mettler, S., & SoRelle, M. (2018). Policy feedback theory. In C. M. Weible & P. A. Sabatier (Eds.), *Theories of the policy process* (4th ed., pp. 103–134). Routledge.
- Murliasari, R. (2021). Implementation of village fund management policy affirmation in village development. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 555–567. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567>
- Pathak, V., & Deshkar, S. (2023). Transitions towards Sustainable and Resilient Rural Areas in Revitalising India: A Framework for Localising SDGs at Gram Panchayat Level. *Sustainability*, 15(9), 7536. <https://doi.org/10.3390/su15097536>
- Pattinasarany, V. P., Saptanno, M. J., Toule, E. R. M., & Pietersz, J. J. (2022). The nature of justice in the implementation of a dynamic government system. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 12(8), 450–458. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.12.08.2022.p12854>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Silviana, W., & Mubarak, A. (2020). Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan pada objek wisata Pantai Carocok Painan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 48–57. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.131>
- Subekti, T., & Kurnia Putri, E. (2020). Thematic village model management as an effort to establish environmental sustainability. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences (ICSS 2019)*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292527>
- Suroso, K. R., Sukristyanto, A., & Kusbandrijo, B. (2020). Head of Village Participation in Thematic Village Policy in Pamekasan District. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(4), 85. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20200404.14>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Timur, A., Busthomi, M., & Masduki, E. (2023). Implementation of slum areas with development of thematic villages in Tangerang City. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 141–156.
- Toda, H. (2021). Kebijakan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 91–114.
- Vivi Charunia Wati, T. W., Rizkita, T. W., Sajiwa, B., Silawarti, R., & Prasetyo, E. (2024). Penyelenggaraan pelayanan go digital pada identitas kependudukan digital (IKD) dalam perspektif dynamic governance. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 233–247. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1806>
- Yuliasuti, N., Esariti, L., Pressilia, A. P., & Syaeful, H. H. (2024). Thematic villages assessment in its consistency towards sustainability. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(1), 242–258. [https://doi.org/10.14246/IRSPSD.12.1\\_242](https://doi.org/10.14246/IRSPSD.12.1_242)

Zhang, Z., Bivona, E., Qi, J., & Yan, H. (2020). Applying dynamic performance management to foster collaborative governance in higher education: A conceptual framework. In C. Bianchi, L. F. Luna-Reyes, & E. Rich (Eds.), *Enabling collaborative governance through systems modeling methods* (Vol. 4, pp. 317–333). Springer.